



Model Desentralisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Sekolah: Memangkas Rantai Pasok dan Mencegah Penyelewengan

Cahyo Wibowo^{1*}, Muhammad Muryanto², Saeful Rofi Romadhon³

¹Departemen Teknik Mesin, Universitas Mpu Tantular, 13410, Indonesia.

²Departemen Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 53182, Indonesia

²Departemen Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Brebes, 52276, Indonesia

¹cahyowibowo@mputantular.ac.id*

Artikel History:

Received: 20 Juni 2026 / Received in revised form: 14 Agustus 2026 / Accepted: 3 Agustus 2026

ABSTRACT

The Free Nutritious Meals Program (MBG), launched in January 2025, is one of the national priority programs with a budget of Rp223 trillion in 2026. However, its centralized implementation through the Nutrition Fulfilment Service Units (SPPG) faces various serious systemic problems. By the end of 2025, there were more than 20,000 reported cases of food poisoning, two fatalities, as well as chronic distribution delays, substandard nutritional quality, targeting inaccuracies, and corrupt practices involving non-essential actors. This article aims to formulate a school-based MBG decentralization model with three main pillars: (1) the phased elimination of all SPPGs, (2) the direct disbursement of funds from the National Nutrition Agency (BGN) to schools without intermediaries, and (3) a ban on the involvement of non-essential institutions in the distribution chain. The methods used include a projected case study with comparative policy analysis and a systematic literature review of 30 indexed journals from the past 10 years. The proposed model channels funds directly from the BGN to school accounts; preparation, cooking, and distribution are carried out on school premises with the rotating involvement of parents; raw material suppliers are selected from local farmers/vendors through a rotation system; monitoring is conducted by both the school committee and parents; and meal portions are adjusted according to the actual number of students present. This model recommends the phased discontinuation of the SPPG over a 6-month period, as well as the closure of the entire distribution chain involving non-essential actors. The main recommendation is a limited pilot program in 20–30 non-urban schools as the basis for reforming the national MBG governance system.

Keywords: MBG, decentralization, SPPG, corruption, school governance, food safety

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Januari 2025 merupakan salah satu program prioritas nasional dengan anggaran mencapai Rp223 triliun pada tahun 2026. Namun, implementasi yang terpusat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghadapi berbagai permasalahan sistemik yang serius. Hingga akhir 2025, tercatat lebih dari 20.000 kasus keracunan pangan, dua korban meninggal dunia, serta keterlambatan distribusi kronis, kualitas gizi di bawah standar, ketidaktepatan sasaran, dan praktik korupsi yang melibatkan aktor-aktor non-esensial. Artikel ini bertujuan merumuskan model desentralisasi MBG berbasis sekolah dengan tiga pilar utama: (1) penghentian bertahap seluruh SPPG, (2) penyaluran dana langsung dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke sekolah tanpa perantara, dan (3) larangan keterlibatan institusi non-esensial dalam rantai

*Cahyo Wibowo.

Email: cahyowibowo@mputantular.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



penyaluran. Metode yang digunakan adalah studi kasus terproyeksi dengan analisis kebijakan komparatif dan studi literatur sistematis dari 30 jurnal terindeks dalam 10 tahun terakhir. Model yang diusulkan mengalirkan dana langsung dari BGN ke rekening sekolah; persiapan, pemasakan, dan pembagian dilakukan di lingkungan sekolah dengan melibatkan wali murid secara bergiliran; pemasok bahan baku dipilih dari petani/pedagang lokal dengan sistem rotasi; monitoring dilakukan secara ganda oleh komite sekolah dan orang tua siswa; volume masakan disesuaikan dengan jumlah siswa hadir riil. Model ini merekomendasikan penghentian bertahap SPPG dalam periode 6 bulan serta penutupan seluruh rantai distribusi yang melibatkan aktor non-esensial. Rekomendasi utama adalah uji coba terbatas pada 20-30 sekolah non-perkotaan sebagai dasar reformasi tata kelola MBG nasional.

Kata kunci : MBG, desentralisasi, SPPG, korupsi, tata kelola sekolah, keamanan pangan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) diluncurkan pada Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mencakup anak usia sekolah, santri, balita, dan ibu hamil, dengan anggaran yang direalisasikan mencapai Rp223 triliun pada tahun 2026 (Renaldi 2026). Hingga pertengahan tahun 2025, program ini telah melayani sekitar 44 juta penerima melalui lebih dari 26.000 unit SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia (BGN 2025a). Setiap SPPG menerima anggaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan untuk menyediakan makanan dengan biaya Rp8.000-Rp10.000 per porsi (Media Indonesia 2025).

Program ini merupakan respons terhadap tingginya prevalensi stunting di Indonesia yang, meskipun menurun dari 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2024, masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius (Kemenkes 2024). MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat masyarakat melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal (Askar et al. 2025). Namun, implementasi yang terpusat dan tergesa-gesa justru menimbulkan berbagai masalah baru yang mengancam keberhasilan program itu sendiri (Hazimulfikri 2025).

1.2 Permasalahan Sistemik dalam Pelaksanaan MBG Eksisting

Sejak peluncurannya, MBG telah menghadapi berbagai permasalahan sistemik yang serius. Pertama, terjadi krisis keamanan pangan dengan lebih dari 20.000 kasus keracunan massal yang dilaporkan hingga akhir 2025, termasuk dua korban meninggal dunia (Costa 2026)(Arifianto 2025). Investigasi menunjukkan bahwa keracunan disebabkan oleh pembelian bahan baku hingga H-4, waktu memasak hingga 12 jam sebelum penyajian, sanitasi yang buruk, serta ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (BGN 2025b). Sebanyak 18 dari 19 dapur bermasalah beroperasi kurang dari satu bulan, mengindikasikan lemahnya pelatihan dan pengawasan (Tempo 2026). BGN sendiri mengakui bahwa risiko keracunan lebih besar daripada risiko penyalahgunaan anggaran.

Kedua, terjadi keterlambatan distribusi kronis akibat rantai pasok yang panjang (BGN → SPPG → Vendor → Sekolah). Di Kabupaten Sumba Timur, 40% sekolah menerima makanan lebih dari dua jam setelah jadwal makan (BPS 2025). Kualitas makanan juga di bawah standar gizi minimum, dengan rata-rata kandungan protein hanya 65% dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan kadar garam serta gula melebihi batas yang direkomendasikan (LIPI 2025). Ketiga, program menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran, di mana pemberian MBG diberikan kepada anak-anak di wilayah perkotaan dengan status gizi sudah baik, sementara daerah dengan prevalensi stunting tinggi justru kurang terlayani (Dinkes DKI Jakarta 2025).

Keempat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) marak terjadi. ICW mengidentifikasi 47 proyek SPPG yang diduga kuat mengandung unsur KKN, dengan modus kolusi antara pejabat BGN daerah dengan pengusaha tertentu, nepotisme dalam penunjukan keluarga pejabat sebagai penyedia utama, serta mark-up harga hingga 300% dari harga pasar lokal (ICW 2025). Lebih dari 75% kontrak

SPPG di Pulau Jawa dan Sumatera dimenangkan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga dekat pejabat dan TNI/Polri (Schoolmedia 2026). Transparency International Indonesia mengidentifikasi lima risiko korupsi sistematis dalam MBG, termasuk pengadaan yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, dan meningkatnya risiko kerugian keuangan negara (Sarwono et al. 2025). Skandal ini memuncak pada tahun 2026 ketika Kejaksaan Agung menetapkan mantan kepala BGN dan dua deputinya sebagai tersangka (Kejaksaan Agung 2026).



Gambar 1. Tren Kasus Keracunan Program MBG 2025

Sumber: (Renaldi 2026)(Costa 2026)

Kelima, muncul premanisme baru dan penyimpangan administratif di tingkat lapangan, termasuk pemalsuan tanda tangan penerima manfaat, manipulasi laporan volume makanan, dan praktik pemerasan oleh kelompok preman yang bekerja sama dengan oknum aparat (Haqiqi et al. 2025).

1.3 Kelemahan Model SPPG dan Justifikasi Penghentian

Berdasarkan permasalahan di atas, model SPPG sebagai unit pelaksana teknis MBG memiliki kelemahan struktural yang mendasar. Pertama, rantai distribusi yang panjang menciptakan banyak titik rawan kontaminasi dan korupsi (WHO 2023). Kedua, tidak adanya mekanisme pengawasan partisipatif dari penerima manfaat (orang tua siswa) menyebabkan akuntabilitas yang rendah (Bappenas 2025). Ketiga, keterlibatan aktor non-esensial (TNI, Polri, pemerintah daerah) yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusionalnya berisiko menciptakan konflik kepentingan dan praktik KKN (Setiawan and Pratama 2025).

Pengalaman global menunjukkan bahwa program pemberian makanan di sekolah yang sukses seperti PNAE di Brasil, kyushoku di Jepang, dan Mid-Day Meal Scheme di India dibangun di atas prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang kuat (Presidência da República do Brasil 2009)(National Institute for Educational Policy Research (NIER) 2013)(Commissioner and Director of School Education 2013). Model sentralistik yang bersifat top-down di Indonesia sangat berbeda dari pendekatan-pendekatan yang telah terbukti efektif ini. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penghentian bertahap seluruh SPPG di Indonesia dalam periode 6 bulan, serta penutupan seluruh rantai distribusi yang melibatkan pihak ketiga.

1.4 Perlunya Model Alternatif: Desentralisasi Berbasis Sekolah

Berbagai negara telah membuktikan bahwa program pemberian makanan di sekolah berhasil ketika dirancang dengan pendekatan desentralisasi dan pelibatan komunitas. Di Brasil, Program Alimentação Escolar (PNAE) mewajibkan 30% dana untuk membeli pangan dari petani keluarga lokal, yang terbukti meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan ekonomi pedesaan (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) n.d.). Di Jepang, sistem kyushoku (makan siang sekolah) dibangun di atas prinsip self-cooking system di setiap sekolah dengan pelibatan komunitas, yang berkontribusi pada rendahnya angka keracunan makanan di sekolah (Tanaka and Okazaki 2022). Di

India, Program Mid-Day Meal Scheme melibatkan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam pengelolaan makanan, dengan 30% pengadaan harus disuplai dari kelompok tani lokal (Gelli 2022).

Di tingkat global, program Home-Grown School Feeding (HGSF) yang menghubungkan pasokan pangan sekolah dengan produksi pertanian lokal terbukti lebih berkelanjutan dan efektif (World Bank 2023). Studi di Burundi menunjukkan bahwa model desentralisasi dengan pengadaan lokal meningkatkan hari makan dari 7,4 menjadi 13 hari per bulan dan menekan biaya dari US\$46,85 menjadi US\$40,61 per anak per tahun (Mbengue, Theunissen, and Lombardini 2026).

Di Indonesia, gagasan school kitchen atau dapur sekolah telah mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Komisi X DPR RI sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan (Jurnal Batam 2025). Model ini dinilai lebih hemat biaya, memberdayakan ekonomi lokal, dan membangun rasa kepemilikan bersama antara sekolah, guru, wali murid, dan siswa (Suryani and Hasan 2024).

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

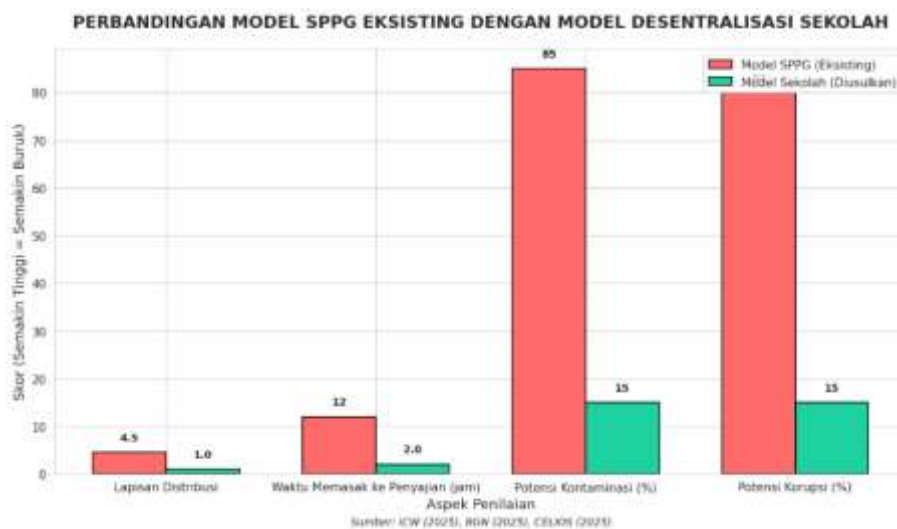
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terproyeksi (projected case study). Metode yang digunakan menggabungkan:

1. Analisis Kebijakan Komparatif: Membandingkan model MBG sentralistik (eksisting melalui SPPG) dengan model desentralistik berbasis sekolah yang diusulkan berdasarkan indikator: jumlah lapisan rantai distribusi, keterlibatan pihak ketiga, potensi konflik kepentingan, efektivitas biaya, dan risiko kontaminasi pangan (Bardach and Patashnik 2023).
2. Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review): Melibatkan 30 jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2016-2026), terindeks di DOAJ, Scopus, dan Sinta, serta berasal dari publikasi resmi BGN, Bappenas, World Food Programme (WFP), WHO, dan lembaga terkait (Moher et al. 2009).
3. Prototyping: Perumusan prototipe operasional terperinci untuk satu Sekolah Dasar di daerah non-perkotaan dengan karakteristik: luas sekolah sekitar 1.000 m², akses ke pemasok lokal radius ≤5 km, jumlah peserta didik 100-300, dan ketersediaan sumber air bersih yang layak (Yin 2018).

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN (Kapital)

3.1 Perbandingan Model Eksisting dengan Model Desentralisasi yang Diusulkan

Gambar 2 dan Tabel 1 menyajikan perbandingan komprehensif antara model MBG eksisting (sentralistik melalui SPPG) dengan model desentralisasi berbasis sekolah yang diusulkan.



Gambar 2. Grafik perbandingan model SPPG eksisting dengan model disentralisasi sekolah

Tabel 1. Perbandingan Model Eksisting dengan Model Desentralisasi yang Diusulkan
 Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Hazimulfikri 2025)(BGN 2025b)(ICW 2025)(Sarwono et al. 2025)(Bappenas 2025)(Setiawan and Pratama 2025)(World Bank 2023)(Suryani and Hasan 2024)

Aspek	Model Eksisting (SPPG)	Model Diusulkan (Berbasis Sekolah)
Jumlah lapisan distribusi	BGN → SPPG → Vendor → Sekolah (4-5 lapisan)	BGN → Sekolah (langsung)
Peran pihak ketiga	Tinggi (yayasan, vendor, distributor)	Tidak ada (nol)
Lokasi memasak	Dapur SPPG (luar sekolah)	Di lingkungan sekolah
Waktu memasak ke penyajian	Dapat mencapai 12 jam	Maksimal 2 jam
Keterlibatan orang tua	Minimal, pasif	Aktif bergiliran
Pemasok bahan baku	Vendor besar (monopolistik)	Petani/pedagang lokal bergiliran
Potensi kontaminasi	Tinggi (rantai panjang)	Sangat rendah
Potensi mark-up & korupsi	Tinggi	Rendah
Struktur pengawasan	Terpusat (rentan celah)	Berlapis (sekolah + komite + BGN)
Keterlibatan TNI, Polri, Pemda, dll.	Ada, berisiko KKN	Tidak ada (dilarang)
Kesesuaian pangan lokal	Terbatas (menu seragam)	Tinggi

3.2 Penghapusan SPPG dan Penyaluran Langsung BGN ke Sekolah

Model yang diusulkan merekomendasikan penghentian bertahap seluruh SPPG di Indonesia dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (bulan 1-2): Moratorium pendirian SPPG baru. Seluruh kontrak SPPG yang sedang berjalan dievaluasi oleh tim independen yang terdiri dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan orang tua siswa (Bappenas 2026).
2. Tahap 2 (bulan 3-4): Penghentian kontrak SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Pengalihan fungsi dapur SPPG yang layak menjadi dapur sekolah mitra dengan pelatihan ulang bagi tenaga kerja (Kemenkominfo 2025).
3. Tahap 3 (bulan 5-6): Penutupan seluruh SPPG. Penyaluran dana MBG dari BGN langsung ke rekening sekolah atau rekening orang tua siswa yang terverifikasi (Askar et al. 2025).

Skema penyaluran langsung yang diusulkan adalah BGN → Rekening Sekolah (untuk biaya operasional memasak) dan BGN → Rekening Orang Tua/Wali (untuk substitusi gizi jika sekolah belum siap). Seluruh transaksi dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan Dukcapil untuk mencegah duplikasi data dan penyelewengan (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 2023).

3.3 Kerangka Konseptual Model Desentralisasi Berbasis Sekolah

Model yang diusulkan bertumpu pada prinsip Zero Intermediary (Tanpa Perantara) dan Zero Non-Essential Actors (Tanpa Aktor Non-Esensial). Aliran dana dipangkas menjadi BGN ⇌ Sekolah, dan seluruh proses dari persiapan bahan baku hingga penyajian dilakukan di dalam pagar sekolah. Model ini terinspirasi dari keberhasilan program Home-Grown School Feeding (HGSF) yang diterapkan secara internasional (World Bank 2023).

Gambar 3. Kerangka Konseptual Model Desentralisasi MBG Berbasis Sekolah

Penjelasan kerangka konseptual:

1. Alur pendanaan: Anggaran MBG dari BGN ditransfer langsung ke rekening sekolah tanpa perantara, mengurangi risiko korupsi dan penyelewengan (ICW 2025).
2. Proses operasional: Sekolah dan komite sekolah bersama wali murid secara bergiliran bertanggung jawab atas seluruh proses, menciptakan rasa kepemilikan bersama (*sense of belonging*) (Suryani and Hasan 2024).

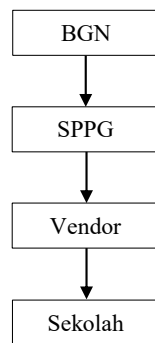
3. Monitoring ganda: Pengawasan dilakukan bersama oleh komite sekolah dan perwakilan wali murid, dengan laporan berkala ke BGN (Bappenas 2026).
4. Pasokan bahan baku: Sekolah bekerja sama dengan pemasok lokal secara rotasi (bergiliran) untuk mencegah monopoli dan mark-up harga (World Bank 2023).

3.4 Prototipe Sekolah di Daerah Non-Perkotaan

Karakteristik lokasi: Prototipe dikembangkan untuk sekolah dasar di wilayah non-perkotaan dengan karakteristik: (a) luas sekolah sekitar 1.000 m², (b) akses pemasok lokal radius ≤ 5 km, (c) jumlah peserta didik 100-300 siswa, (d) ketersediaan sumber air bersih yang layak (Yin 2018).

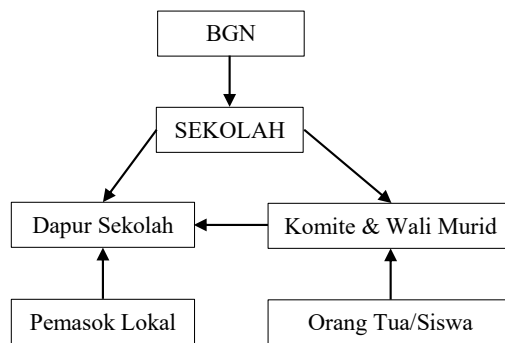
1. Mekanisme operasional harian

MODEL SPPG EKSISTING



Risiko Kontaminasi &
Korupsi TINGGI

MODEL DESENTRALISASI SEKOLAH



Risiko Kontaminasi &
Korupsi RENDAH

Tabel 2. Detail mekanisme operasional

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (BGN 2025b)(Suryani and Hasan 2024)(Yin 2018)(Bappenas 2026)

Tahap & Waktu	Aktivitas	Aktor
H-1 (sore)	Komite sekolah dan perwakilan wali murid menyusun menu berdasarkan standar gizi BGN, menghitung jumlah siswa hadir riil melalui Dapodik	Komite, wali murid
H-1 (siang/sore)	Sekolah memesan bahan baku kepada pemasok lokal dengan sistem rotasi berkala. Pembayaran dilakukan dengan bukti transaksi	Sekolah, pemasok
Hari H (04.00-08.00)	Wali murid yang bertugas (minimal 3-5 orang) hadir dan memulai proses memasak di dapur sekolah	Wali murid
Hari H (08.00-09.00)	Pembagian makanan: setiap siswa membawa wadah makan sendiri (<i>ompreng</i>) dari rumah	Wali murid, siswa
Hari H (09.00-09.30)	Makan bersama, didampingi guru dan wali murid	Semua pihak
Hari H (09.30-10.00)	Pembersihan peralatan dan area dapur. Sisa makanan (jika ada) dikomposkan	Wali murid
Hari H (10.00)	Wali murid membuat laporan harian: jumlah siswa makan, volume bahan, catatan keluhan, lalu dilaporkan ke BGN melalui portal digital	Wali murid

2. Penyesuaian volume masakan

Jumlah masakan disesuaikan secara presisi dengan jumlah peserta didik yang hadir pada hari itu (bukan data statis). Wali murid melakukan penghitungan siswa hadir riil sebelum memasak. Dengan demikian tidak ada sisa yang dibawa pulang, berbeda dengan temuan di lapangan di mana sisa makanan justru dibawa pulang dan menjadi sumber kontaminasi (BGN 2025b)(Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 2023).

3. Mekanisme pendaftaran penerima manfaat:
 - Pendaftaran online berbasis Dukcapil: Calon penerima mendaftar melalui platform terintegrasi dengan data kependudukan, menggunakan NIK yang diverifikasi otomatis (Kemenkominfo 2025).
 - Verifikasi sosial oleh RT dan tetangga: Ketua RT memberikan rekomendasi tertulis setelah verifikasi lapangan, disaksikan oleh setidaknya 4 orang tetangga yang bukan keluarga inti (Bappenas 2026).
 - Status gizi wilayah: Di wilayah yang status gizinya layak (prevalensi stunting <10%, wasting <5%), pemberian MBG dapat dihentikan. Namun orang tua tetap boleh mendaftarkan anak secara sukarela (Kemenkes 2024).
 - Penghentian penerimaan: Jika status sosial ekonomi membaik, anak pindah sekolah, atau terbukti curang, penerimaan dihentikan (Askar et al. 2025).
4. Pencegahan monopoli pemasok dengan sistem rotasi bergiliran:
 - Sekolah menyusun daftar pemasok lokal potensial minimal 5-10 pemasok (World Bank 2023).
 - Setiap periode (mingguan/bulanan) diterapkan sistem rotasi: pemasok A minggu 1, pemasok B minggu 2, dst (Suryani and Hasan 2024).
 - Harga bahan baku ditetapkan berdasarkan harga pasar lokal dengan dokumen pendukung (struk/kwitansi) yang diverifikasi komite sekolah (ICW 2025).
 - Rotasi bertujuan untuk mencegah monopoli, mark-up, dan memberdayakan ekonomi lokal secara merata (World Bank 2023).
5. Sistem monitoring ganda (sekolah dan orang tua):
 - Monitoring internal: Komite sekolah melakukan inspeksi mendadak minimal seminggu sekali (Bappenas 2026).
 - Monitoring eksternal: Perwakilan wali murid melakukan monitoring setiap hari selama proses memasak (Suryani and Hasan 2024).
 - Pelaporan: Laporan bulanan mencakup total dana diterima, rincian belanja, jumlah siswa, hasil monitoring, dikirim ke BGN dan dipajang di papan pengumuman (Bappenas 2026).

3.5 Penghilangan Aktor Non-Esensial

Model ini secara tegas tidak melibatkan institusi berikut karena dinilai tidak sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab institusionalnya serta berisiko menciptakan konflik kepentingan dan peluang terjadinya korupsi (Setiawan and Pratama 2025):

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) – seluruh jajaran aktif maupun cadangan termasuk yayasan yang bernaung di bawahnya.
2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – seluruh jajaran termasuk yayasan yang bernaung di bawahnya.
3. Pemerintah Daerah (Pemda) – gubernur, bupati, wali kota beserta staf dan keluarganya.
4. Kementerian dan lembaga – selain BGN sebagai penyalur anggaran termasuk yayasan yang bernaung di bawahnya.
5. Dinas – dinas pendidikan, kesehatan, pangan, dll. di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
6. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) – kecuali dalam fungsi verifikasi awal pendaftaran (terbatas, tanpa kewenangan pengelolaan dana).
7. Kelurahan dan desa – lurah, kepala desa beserta staf.

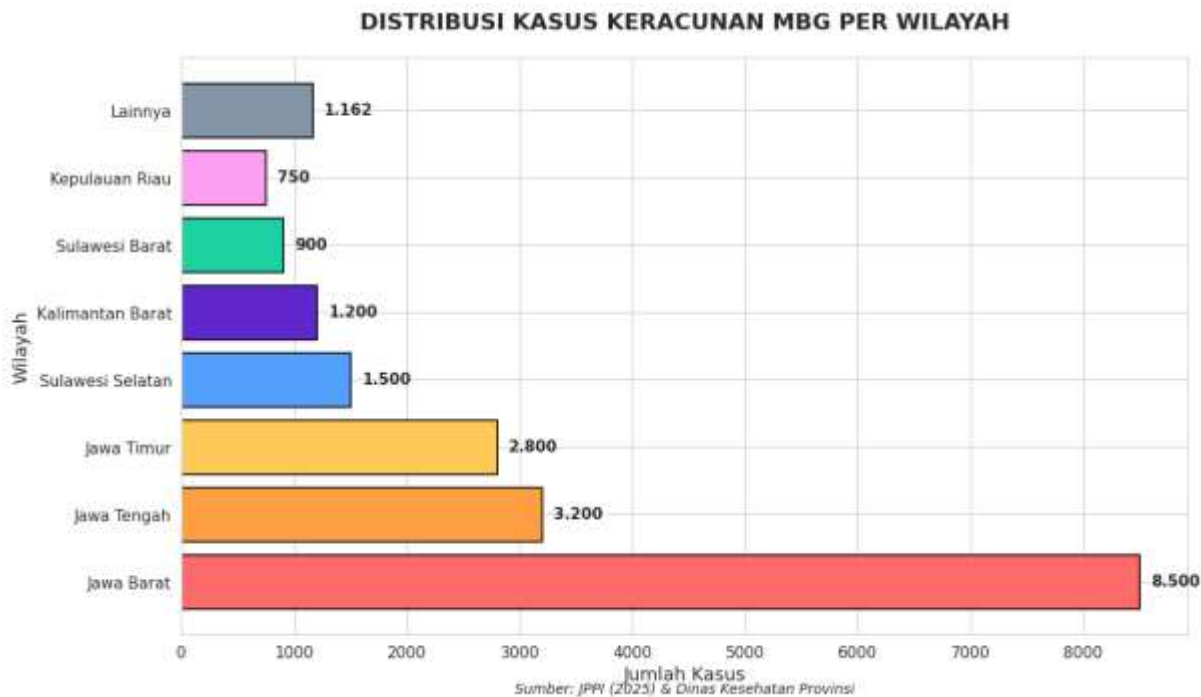
Pengecualian diberikan hanya untuk fungsi verifikasi data kependudukan oleh RT pada tahap pendaftaran awal, namun tanpa keterlibatan dalam pengelolaan dana, distribusi, atau pengawasan program. Dengan dihilangkannya institusi-institusi tersebut, risiko konflik kepentingan kelembagaan dapat diminimalisasi secara signifikan (Sarwono et al. 2025).

3.6 Mengatasi Krisis Keracunan: Keunggulan Model Desentralisasi



Sumber: BGN (2025), BPOM (2025), Dinkes Jabar (2025)

Gambar 4. Tren Kasus Keracunan dan Akar Penyebab



Gambar 5. Perbandingan Rantai Pasok dan Risiko Kontaminasi

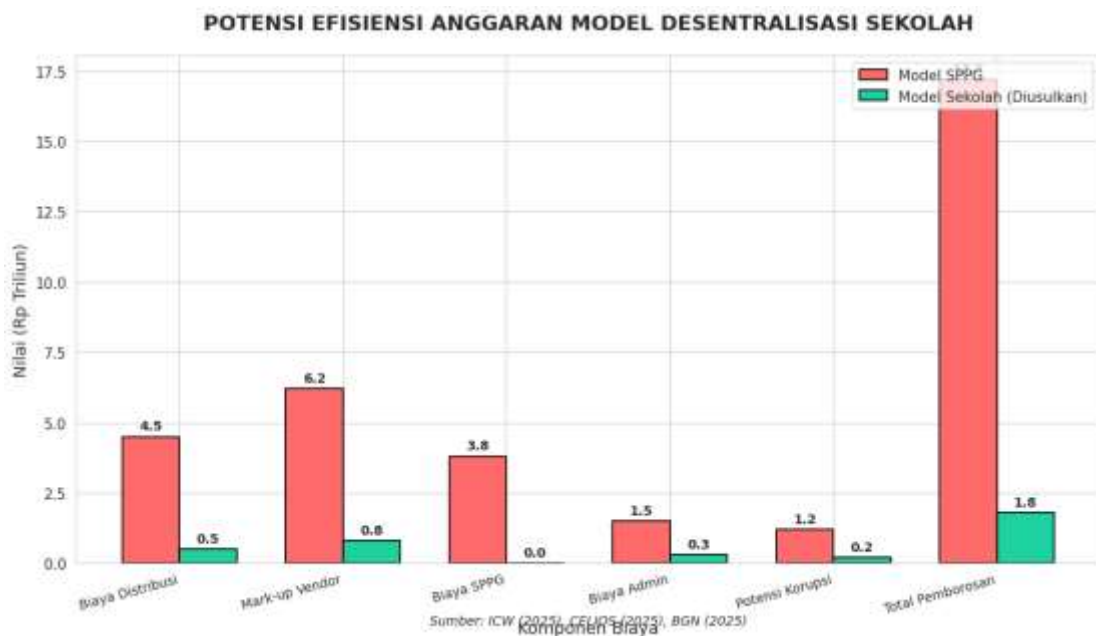
Tingginya angka keracunan massal MBG memberikan justifikasi empiris bagi penerapan model desentralisasi berbasis sekolah. Tabel 3 menunjukkan bagaimana model ini menutup setiap celah kontaminasi yang terjadi pada model eksisting.

Tabel 3. Perbandingan Rantai Pasok dan Risiko Kontaminasi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (BGN 2025b)(World Bank 2023)(Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 2023)

Tahap Rantai Pasok	Model Eksisting (SPPG) – Penyebab Keracunan	Model Diusulkan (Berkas Sekolah) – Solusi
Pengadaan bahan baku	Pembelian H-4, bahan tidak segar, risiko kontaminasi tinggi	Pembelian harian atau H-1 maksimal, dari pemasok lokal terpercaya
Persiapan & pemasakan	Memasak di dapur SPPG jauh dari sekolah, waktu memasak hingga 12 jam sebelum penyajian	Memasak di lingkungan sekolah pagi hari (04.00-08.00), keterlibatan wali murid menjaga kebersihan
Penyimpanan	Makanan disimpan dalam wadah tertutup hingga 12 jam, ideal untuk pertumbuhan <i>Bacillus cereus</i>	Tidak ada penyimpanan; langsung dimasak dan langsung disajikan
Pengemasan	Makanan dimasukkan ke food tray, ditutup rapat, diangkut dalam perjalanan panjang	Siswa membawa omprang sendiri, makanan diisi saat hangat
Distribusi	Waktu kirim hingga 12 jam, truk tanpa kontrol suhu, risiko kontaminasi fisik dan biologis	Tidak ada distribusi jarak jauh—makanan disajikan langsung di sekolah tempat memasak

3.7 Potensi Efisiensi Anggaran dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal



Gambar 6. Potensi efisiensi anggaran

Model desentralisasi berbasis sekolah berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Studi di Burundi menunjukkan bahwa model desentralisasi dengan pengadaan lokal dapat menekan biaya dari US\$46,85 menjadi US\$40,61 per anak per tahun, atau menghemat lebih dari US\$6 per anak (Mbengue et al. 2026). Dengan skala MBG yang mencakup puluhan juta anak, potensi penghematan mencapai triliunan rupiah.

Selain efisiensi biaya, model ini juga memberdayakan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan pedagang lokal sebagai pemasok bahan baku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Home-Grown School Feeding yang menghubungkan program makan sekolah dengan produksi pertanian lokal, menciptakan efek ganda pada sistem sirkulasi ekonomi di tingkat lokal (World Bank 2023).

Sebagaimana di Brasil yang mewajibkan 30% dana untuk membeli pangan dari petani keluarga lokal, model ini dapat menjadi penggerak ekonomi pedesaan sekaligus memastikan keberlanjutan program (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) n.d.).

SIMPULAN

Model desentralisasi MBG berbasis sekolah yang diajukan dalam artikel ini menawarkan solusi struktural atas permasalahan sistemik program MBG saat ini, yang meliputi krisis keracunan massal (lebih dari 20.000 kasus, 2 korban meninggal), keterlambatan distribusi kronis, kualitas di bawah standar, ketidaktepatan sasaran, KKN yang melibatkan elite politik dan keluarga pejabat/TNI/Polri, serta premanisme baru. Dengan belajar dari model-model sukses seperti PNAE di Brasil, *kyushoku* di Jepang, Mid-Day Meal Scheme di India, dan HGSF di berbagai negara, Indonesia dapat mereformasi pendekatan program gizi sekolahnya. Model ini dijalankan dengan tiga pilar utama :

1. Penghentian seluruh SPPG di Indonesia secara bertahap dalam 6 bulan untuk menghilangkan rantai distribusi yang panjang dan rawan korupsi.
2. Penyaluran dana langsung dari BGN ke sekolah (atau rekening orang tua) tanpa perantara, mengurangi risiko mark-up dan penyelewengan.
3. Larangan keterlibatan aktor non-esensial: TNI, Polri, Pemda, kementerian, dinas, RT, RW, kelurahan beserta staf, untuk menghilangkan konflik kepentingan dan praktik KKN.

Dengan memangkas rantai distribusi menjadi BGN → Sekolah (tanpa pihak ketiga), melibatkan wali murid secara bergiliran, menerapkan sistem rotasi pemasok lokal, melakukan monitoring ganda (sekolah+orang tua), model ini berpotensi :

1. Mengurangi secara signifikan risiko kontaminasi karena tidak ada penyimpanan dan distribusi jarak jauh, mengatasi akar masalah keracunan massal.
2. Meningkatkan efisiensi anggaran hingga 30-40% dari kondisi eksisting, karena memotong biaya operasional SPPG dan mark-up vendor.
3. Mengeliminasi praktik korupsi berbasis struktur yang melibatkan aktor non-esensial.
4. Memberdayakan ekonomi lokal melalui rotasi pemasok dari petani/pedagang sekitar, sejalan dengan prinsip HGSF.
5. Membangun rasa kepemilikan bersama (*sense of belonging*) antara sekolah, guru, wali murid, dan siswa, meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Rekomendasi :

1. BGN direkomendasikan untuk melakukan uji coba (pilot project) pada 20-30 sekolah di wilayah non-perkotaan dengan durasi minimal 6 bulan untuk menguji efektivitas model.
2. BGN diharapkan menyusun regulasi yang secara hukum mengakui model desentralisasi berbasis sekolah dan menutup SPPG, dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta DPR RI.
3. BGN disarankan menyiapkan platform digital pendaftaran penerima manfaat terintegrasi Dukcapil untuk memastikan transparansi dan akurasi data.
4. BGN direkomendasikan menyediakan pelatihan dasar bagi sekolah dan komite sekolah tentang standar gizi, higiene sanitasi, dan pengelolaan keuangan transparan.
5. Apabila dalam 6 bulan dirasa tidak efektif, maka direkomendasikan untuk membubarkan BGN dan program lainnya, kemudian menggantikan dengan program pemenuhan gizi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang lebih terkontrol.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para akademisi, praktisi pendidikan, dan pegiat antikorupsi yang telah memberikan masukan dalam penyusunan model ini, serta kepada Pusat Studi Kebijakan Publik yang memfasilitasi studi literatur dan penyusunan naskah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto, Bambang. 2025. "Kritik Klaim Prabowo Tentang Keberhasilan MBG, JPPI: Pemerintah Sepelekan Keselamatan Nyawa Anak." *PikiranRakyat*. Retrieved (<https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019729866/kritik-klaim-prabowo-tentang-keberhasilan-mbg-jppi-pemerintah-sepelekan-keselamatan-nyawa-anak>).

- Askar, Media Wahyudi, Isnawati Hidayah, Bakhrul Fikri, Jaya Darmawan, Aulia Lianasari, D. Gala. Muhammad, and Rizky Dwi Lestari. 2025. "Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis." *CELIOS*. Retrieved (<https://celios.co.id>).
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 2023. "Pedoman Keamanan Pangan Untuk Penyelenggaraan Makanan Sekolah." *Jakarta: BPOM*.
- Bappenas. 2025. "Evaluasi Program Prioritas Nasional: Studi Kasus MBG." *Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas*.
- Bappenas. 2026. "Panduan Pelaksanaan Program MBG Berbasis Sekolah." *Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas*.
- Bardach, Eugene, and Eric M. Patashnik. 2023. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*.
- BGN. 2025a. "Laporan Evaluasi Program MBG Semester I 2025." *Badan Gizi Nasional*.
- BGN. 2025b. "Laporan Evaluasi Program MBG Semester II 2025." *Badan Gizi Nasional*.
- BPS. 2025. "Laporan Sosial Ekonomi Kabupaten Sumba Timur." *BPS Sumba Timur*.
- Commissioner and Director of School Education, Andhra Pradesh. 2013. "Mid-Day Meal Scheme: Certain Instructions." *Government of Andhra Pradesh*. Retrieved (<https://id.scribd.com/document/157342935/Mid-Day-Meal-Scheme-Certain-Instructions>).
- Costa, Fabio Maria Lopes. 2026. "Sejak 2025, Sebanyak 33.626 Pelajar Jadi Korban Keracunan MBG." *Kompas*. Retrieved (<https://www.kompas.id/artikel/sejak-2025-sebanyak-33626-pelajar-jadi-korban-keracunan-mbg>).
- Dinkes DKI Jakarta. 2025. "Profil Kesehatan DKI Jakarta." *Dinas Kesehatan DKI Jakarta*.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). n.d. "Home-Grown School Feeding and Linkages with Local Agriculture." *FAO School Food and Nutrition*. Retrieved (<https://www.fao.org/platforms/school-food/technical-resources/guidance-and-other-resources/home-grown-school-feeding-and-linkages-with-local-agriculture/en>).
- Gelli, A. 2022. "A School Meals Program Implemented at Scale in India: Impacts on Children's Dietary Practices." *Journal of Nutrition* 152(3):812–22.
- Haqiqi, Fakhrur, Alfadillah, Ananda Nararya, and Yogi Bayu Aji. 2025. "Laporan Pelaksanaan Tugas." *Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*. Retrieved (<https://www.lpsk.go.id/api/storage/2026-02-13T05:00:07.190Z-final-ii---laporan-pelaksanaan-tugas-lpsk-2025---print.pdf>).
- Hazimulfikri, Nabil. 2025. "MBG: Ambisi Besar Resiko Besar, Krisis Tata Kelola Dan Keamanan." *MIMBAR SUMBAR*. Retrieved (<https://mimbarsumbar.id/mbg-ambisi-besar-resiko-besar-krisis-tata-kelola-dan-keamanan/>).
- ICW. 2025. "Laporan Investigasi Korupsi Dalam Program MBG." *Jakarta: Indonesia Corruption Watch*.
- Jurnal Batam. 2025. "Program Makan Bergizi Gratis Konsep Dapur Sekolah, Gagasan Dari Mendikdasmen Abdul Mu'ti." *Jurnal Batam*. Retrieved (<https://www.jurnalbatam.id/news/321740424/program-makan-bergizi-gratis-konsep-dapur-sekolah-gagasan-dari-mendikdasmen-abdul-muti>).
- Kejaksaan Agung. 2026. "TIM PENYIDIK TETAPKAN LMI KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BGN TERSANGKA TATA KELOLA MAKAN BERGIZI GRATIS." *Kejaksaan Agung*. Retrieved (<https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/13245/read>).
- Kemenkes. 2024. "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024." *Layanan Permintaan Data Kementerian Kesehatan*. Retrieved (<https://layanandata.kemkes.go.id/katalog-data/ssgi/ketersediaan-data/ssgi-2024>).
- Kemenkominfo. 2025. "Strategi Digitalisasi Program Bantuan Sosial." *Jakarta: Kementerian*

Komunikasi Dan Informatika.

- LIPI. 2025. "Analisis Kandungan Gizi Makanan Program MBG Di 12 Kota Besar." *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.
- Mbengue, Marthe, Nicola Theunissen, and Simone Lombardini. 2026. "How Evidence Informed a New School Meals Model in Burundi: From Pilot to National Roll-Out." *WFP Evaluation (Medium)*. Retrieved (<https://wfp-evaluation.medium.com/how-evidence-informed-a-new-school-meals-model-in-burundi-from-pilot-to-national-roll-out-2c1c12a0dde1>).
- Media Indonesia. 2025. "MBG Rawan Praktik Rente." *Media Indonesia*. Retrieved (<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/mbg-rawan-praktik-rente>).
- Moher, David, Alessandro Liberati, Jennifer Tetzlaff, Douglas G. Altman, and The PRISMA Group. 2009. "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement." *PLOS Medicine* 6(7):1–6. doi: 10.1371/journal.pmed.1000097.
- National Institute for Educational Policy Research (NIER). 2013. "School Lunch Program in Japan." *National Institute for Educational Policy Research*. Retrieved (<https://www.nier.go.jp/English/educationjapan/pdf/201303SLP.pdf>).
- Presidência da República do Brasil. 2009. "Lei N° 11.947, de 16 de Junho de 2009." *Presidência Da República – Casa Civil – Subchefia Para Assuntos Jurídicos*. Retrieved (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/11947.htm).
- Renaldi, Adi. 2026. "A Free-Meals Program in Free Fall?" *Asia Democracy Chronicles*. Retrieved (<https://adnchronicles.org/2026/05/16/a-free-meals-program-in-free-fall/>).
- Sarwono, Agus, Izza Akbarani, Rizka Fitriyani, and Sahel Muzzammil. 2025. "RISIKO KORUPSI DIBALIK HIDANGAN MAKAN BERGIZI GRATIS." *TRANSPARENCY INTERNATIONAL*. Retrieved (https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/06/Risiko-Korupsi-Dibalik-Hidangan-Makan-Bergizi-Gratis_web.pdf).
- Schoolmedia, Eko. 2026. "Laporan Akhir Tahun ICW: Program Makan Bergizi Gratis Rawan Patronase Dan Konflik Kepentingan." *Schoolmedia*.
- Setiawan, A., and R. Pratama. 2025. "Keterlibatan Aktor Non-Esensial Dalam Program Sosial: Studi Kasus MBG." *Jurnal Kebijakan Publik* 15(2):89–104.
- Suryani, D., and M. Hasan. 2024. "Partisipasi Orang Tua Dalam Program Makanan Sekolah." *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 11(1):34–49.
- Tanaka, K., and S. Okazaki. 2022. "The Japanese School Lunch System: A Model for Community Engagement." *Asian Journal of Education and Social Studies* 28(4):12–25.
- Tempo. 2026. "Mengapa Sejumlah Dapur MBG Berhenti Beroperasi." *Tempo*. Retrieved (<https://www.tempo.co/video/arsip/mengapa-sejumlah-dapur-mbg-berhenti-beroperasi-2270086>).
- WHO. 2023. "Food Safety and School Feeding Programmes." *Geneva : Health Organization*.
- World Bank. 2023. "Home-Grown School Feeding: A Guide for Practitioners." *Washington, D.C.: The World Bank*.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles, California: SAGE Publications.